

**PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh

Sri Devi Afriliyana

1505026015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Muyassarrah, MSI
NIP.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Sri Devi Afriliyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Devi Afriliyana
NIM : 1505026015
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi pada BUMDES Wahyu Urip di Desa
Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

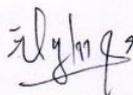
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II



Muvassarrah, MSI
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sri Devi Afriliyana
NIM : 1505026015
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi
Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup pada tanggal: 19 Desember 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana
(Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 19 Desember 2019

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Si

NIP. 19690709 199403 2 000

Penguji Utama I

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji Utama II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Si

NIP. 19690830 199403 2 000

Pembimbing I

Drs. H. Hasvim Svarbani, M.M

NIP. 19570913 198203 1 002

Pembimbing II

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Muvassarah, M.Si.

NIP.

MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: ".....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu....". (Q.S. Al-Hasyir: 7)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Alhamdulillahirobbil'alamiin, ucapan syukur tiada henti kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan lahir dan batin kepada diri penulis dalam menyusun skripsi ini hingga pada akhirnya karya tulis ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis,
Bapak Wagiman yang telah memperjuangkan dan rela mengorbankan apapun demi keberhasilan pendidikan tinggi putrinya.

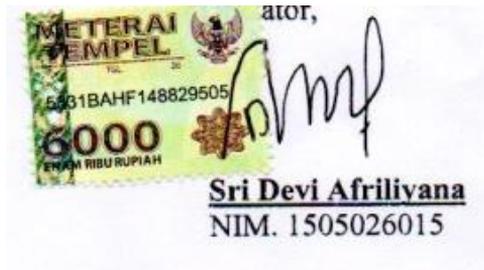
Ibu Ngatini yang telah menjadi penenang dan penguat jiwa penulis dalam menuntaskan kewajiban pendidikannya. Kepada segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberi dukungan moral maupun bantuan lain dalam bentuk apapun.

Terima kasih atas kucuran doanya yang tak henti menemani langkah penulis dalam menuntut ilmu. Terima kasih pula atas kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan dalam menanti keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2019



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

D. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

E. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya
الطَّبّ = *al-thibb*.

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang ال... () ditulis dengan *al-....* misalnya الصناعة
= *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak
pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة
الطبيعية = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

ABSTRAK

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu di mobilitas agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat

Deskriptif data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan analisis dokumen-dokumen BUMDES. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 3 tahapan yakni pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusun sistem data (*systematizing*). Analisa data menggunakan reduksi data, data display dan teknik verifikasi (kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan Kontribusi BUMDES Wahyu Urip dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan berhasilnya unit-unit usaha yang ada di dalamnya. Sehingga masyarakat di desa Trimulyo sejahtera, walaupun belum rata. Dalam pandangan ekonomi Islam masyarakat desa Trimulyo telah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyah*, *al-hajjiyah*, dan *al-tahsiniiyyah*.

Kata Kunci: *Peran, Kontribusi, BumDes, Ekonomi Islam, Ekonomi Kerakyatan.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi di BUMDES Wahyu Urip dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh Islam.

Skripsi yang berjudul “*PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BUMDES Wahyu Urip di desa Trimulyo)*”, disusun dengan I'tikad dan semangat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi, khusus Ekonomi Islam serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, pengetahuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dengan segala

- kebijakan yang telah memimpin UIN Walisongo Semarang demi kemajuan Universitas yang lebih baik.
2. Yth. Bapak Dr. M. Saifullah, M.Ag., yang telah berusaha memimpin Fakultas Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang menjadi Pusat Studi Ekonomi Islam
 3. Yth. Pengelola Prodi Ekonomi Islam, Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku ketua prodi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan nasihat kepada penulis selama menjalani masa studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
 4. Yth. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku wali studi Ekonomi Islam yang telah membimbing penulis dari semester satu sampai akhir.
 5. Yth. Bapak Drs. Saekhu, MH., selaku pembimbing I serta ibu Muyassarah, MSI, selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
 7. Kedua orang tuaku tercinta serta keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Ika Ratna S serta pengurus BUMDES Wahyu Urip yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penelitian untuk penulisan skripsi.
9. Ade Fitriyaningsih A.Md yang selalu membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis apabila mengalami kesulitan dalam menulis skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Eva Sukmawati, Yulailani yang selalu mendukung memberi motivasi dan do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Segenap keluarga besar IKLAS UIN Walisongo Semarang, Fatur, Najib, Jefri, Ari, Lilis, Hidayah, Lula, dkk terima kasih atas bimbingan dan kepercayaannya.
12. Segenap keluarga besar Kos Pak Kasmad, Fc Delisha dan Fc Syakira terima kasih yang telah membantu penulis.
13. Segenap keluarga besar Ekonomi Islam angkatan 2015 atas semangatnya tak pernah putus. Khusus EIA Arnas, Mita, Zulfa, Muhim, Azizah, terima kasih atas kesempatan bersama-sama di kelas.
14. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala khilaf.

Penulis tidak mampu membalas kebaikan mereka dengan semestinya, namun doa yang dapat penulis panjatkan semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun ulasannya, saya selaku penulis mohon maaf. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, Desember 2019

Sri Devi Afrilivana
NIM. 1505026015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tujuan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber data	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisis Data.....	12

G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Otonomi Desa	16
1. Desa	16
2. Konsep Otonomi Desa	17
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	20
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	26
1. Pengertian Peranan.....	26
2. Pengertian badan Usaha milik Desa.....	27
3. Tujuan BUMDES.....	30
4. Dasae dan Badan hukum.....	31
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	33
6. Kesejahteraan Masyarakat	34
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	35
BAB III: GAMBARAN UMUM BUMDES	51
A. Profil Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Kondisi Demografis	52
3. Kondisi Sosial Ekonomi	52
4. Kondisi Keberagamaan.....	55

B. Gambaran Umum BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo	56
1. Organisasi Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	56
2. Tujuan Pembentukan BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	57
3. Struktur Kepengurusan BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	57
4. Visi Misi BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	63
C. Unit Kegiatan Usaha BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	63
D. Peran BUMDES Wahyu Urip terhadap masyarakat desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	65
E. Kontribusi BUMDES Wahyu Urip terhadap masyarakat desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	66

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...69

A. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	69
---	----

B. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat	85
BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Trimulyo.....	52
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok	53
Tabel 3.3	Rata-rata Pendapatan Penduduk	54
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.	54
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	55
Tabel 3.6	Sarana Peribadatan di desa Trimulyo	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Oleh sebab itu 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah pedesaan. Desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa. Sehingga pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa.

Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesejahteraan, dan perumahan.¹Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.² Pengembangan basis ekonomi di pedesaan melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

¹M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994, h.55

²Maria Rosa, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul*, Yogyakarta, MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016.

Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No.6/2014 pasal 1 angka 6 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilitas potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset dan sumber-sumber ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal (1) ayat UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³ BUMDES adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan aset dan sumber-sumber ekonomi desa berasal dari kekayaan desa.

Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴ BUMDES berfungsi sebagai jalan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk pilar kemandirian bangsa.

Desa Trimulyo merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik

³Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, h.2

⁴Kamaroesid, *Tata Cara...*, hal.3

pula dan telah memiliki BUMDES didalamnya, Badan Usaha desa Trimulyo ini di dirikan pada tahun 2015. badan usaha ini kemudian dinamakan Badan Usaha Milik desa Wahyu Urip. Dari hasil Survey pengamatan penelitian tentang BUMDES di desa Trimulyo. Badan Usaha Milik Desa disini menjalani beberapa jenis unit usaha untuk menambah pendapatan desa, yaitu:

1. Pinjaman Bergulir
2. Penjualan Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi
3. Pengelolaan Pasar Desa

Salah satu untuk menambah pendapatan desa dengan adanya pengelolaan pasar desa menyewakan ruko-ruko yang disewakan ke masyarakat desa itu sendiri maupun masyarakat di desa lain. Penyewaan ruko-ruko dihitung dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000/ruko dalam waktu 5 tahun.

Bahwa peran dan kontribusi BUMDES di Wahyu Urip mengalami peningkatan secara signifikan yakni dari 15 sampel terdiri dari 5 anggota, 5 pengurus, 5 masyarakat menyatakan bahwa peran dan kontribusi BUMDES Wahyu Urip belum dalam mensejahterakan seluruh masyarakat di desa itu.

BUMDES Wahyu Urip ini sudah berjalan kurang lebih 4 Tahun tetapi masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut. Pemerintah desa telah membuat BUMDES Wahyu Urip yang bertujuan untuk menambah pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat tetapi hampir 4 tahun berdirinya badan usaha tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan masyarakat seluruh masyarakat Wahyu Urip.

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BUMDES Wahyu Urip Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji, yakni:

1. Bagaimana Peran dan Kontribusi Program BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa Trimulyo?
2. Bagaimana Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peran Pelaksanaan Program Masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui Peran Program BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan dalam bidang pengembangan ilmu ekonomi, terutama ekonomi islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para ekonomi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menelaah beberapa buku dan temuan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian

yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Pertama, Jurnal *Dinamika Ekonomi dan Bisnis Islam* yang di tulis oleh Eddy Yusuf Agunggunantok,dkk, yang berjudul “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”peneliti ini menjelaskan kondisi dan tata kelola BUMDES yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Hasil Penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDES di kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDES dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalani masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDES dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.⁵ Dalam jurnal tersebut bahwa kondisi BUMDES di Jepara berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDES dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa, tetapi masih dapat kendala dalam pengelolaan BUMDES di beberapa daerah.

Kedua,Journal yang tertulis oleh bambang dengan judul “*implementasi Badan Usaha Milik Desa berbasis Ekonomi Islam*”, menjelaskan bahwa, penelitian ini menjelaskan menganalisis telah implementasi konsep ekonomi islam pada bisnis Badan Usaha Milik Desa. Untuk mewujudkan BUMDES berbasis Ekonomi Islam memerlukan peran dan aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa masyarakat,alim ulama’, dewan syariah nasional, lembaga swada masyarakat, dan pihak-pihak yang concern terhadap perkembangan BUMDES dan Ekonomi Islam.

Ketiga,Skripsi yang ditulis oleh “Feni Yudanti Prasetyaningtyas dengan judul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur kabupaten wonosobo*”, menjelaskan bahwa dalam perjalanan pengelolaan alokasi dana desa

⁵Eddy Yusuf Agunggunanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal *Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol.13 No. 1 Maret 2016.

menggunakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah tahapan Perencanaan, Tahapan Penganggaran, Tahapan Mekanisme Permohonan dan Pencairan dana, Tahapan Penggunaan, Tahapan Pengawasan, dan Tahapan Pertanggungjawaban. Namun dalam tahapan pemberdayaan regulasinya itu berubah-ubah sehingga sedikit membuat kebingungan masyarakat serta dalam pengawasan masyarakat juga belum paham sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok desa.⁶ Dalam skripsi tersebut bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum transparansi dan sosialisasi untuk masyarakat di pelosok desa.

Keempat, Jurnal ilmu Administrasi Negara yang ditulis Oleh Khairul Amri yang berjudul “*Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”. Dengan sifat penelitian kualitatif yang menggunakan Snowballing sampai serta teknik pengumpulan data nya dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi pelaksanaan program BUMDES secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal.⁷ Dalam jurnal tersebut bahwa pelaksanaan program BUMDES secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.

Adapun penelitian yang akan penulis teliti Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo kecamatan juwana Kabupaten Pati). Meskipun udah penelitian tentang BUMDES, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dan fokus penelitian pada peran dan kontribusi BUMDES Wahyu Urip dalam mensejahterakan masyarakat desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

⁶Feni Yudanti, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. Fakultas. Ilmu Sosial dan Ilmu

⁷Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13 No 3 tahun 2015

F. Metode Penelitian

Untuk merangkai sebuah karya Ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, dan definisi pada suatu situasi tertentu. Pendekatan ini lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh sebab itu, urutan kegiatan dapat berubah bergantung pada kondisi dan gejala yang ditemukan.⁹

Penulisan menggunakan teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan langsung oleh penulis agar dapat memperoleh data yang pasti.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan Skripsi ini di Klasifikasikan data yang diperlukan :

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama biasanya diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.¹⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDES dan dari masyarakat Trimulyo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh

⁸Juliansyah Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2012, hal.35

⁹Afifuddin bin Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV, Pustaka Setia, 2009, h.94

¹⁰Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.84

¹¹Brata, *Metode...*, hal.85

data sekunder dari dokumentasi yang berkaitan dengan BUMDES Wahyu Urip, Jurnal Penelitian, Buku, Artikel, website dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Metode Wawancara

Adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penelitian kepada subjek penelitian untuk di jawab. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini khususnya adalah masyarakat desa Trimulyo Maupun Pengurus BUMDES Wahyu Urip.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dalam objek penelitian. Menurut patto, observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat aktivitas dan makna dan kejadian yang diamati.¹²

c. Metode Dokumentasi

Adalah biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah Proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna dan interpretasi sehingga

¹²Afifudin dan BeNI Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : CV, Pustaka Setia, 2009, h.94

informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Karena penelitian ini yang penulis bahas sifatnya deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Model ini kegiatannya analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan tahapannya:

a. Tahapan Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.¹³

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu upaya kelompok yang sadar atas sistem kerjasama syirkah dan aktif didalamnya. Dan penulis dapat mengklarifikasikan topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulisan gunakan.

c. Tahap Verifikasi Data/penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi data / Penarikan kesimpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil

¹³Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010, h.164-165

dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang akan ditulis oleh penulis, maka peneliti ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori peran dan kontribusi, teori kesejahteraan masyarakat desa dalam perspektif islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM BUMDES WAHYU URIP

Bab ini mencakup gambaran umum BUMDES Wahyu Urip mulai dari sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, unit usaha yang dikelola BUMDES Wahyu Urip dan peran dan kontribusi BUMDES untuk pembangunan desa yang diterapkan di BUMDES Wahyu Urip.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kesejahteraan masyarakat desa dalam perspektif ekonomi islam desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Desa

1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of house or shop in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

*“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”*¹

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*²

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunikasi yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur

¹H.A.W, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang dan utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003 , h.3.

²UU NO.3 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12

kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Konsep Otonomi Desa

Menurut Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.³

Otonomi desa merupakan suatu peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai cara perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggara pemerintah, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal dengan demikian otonomi desa memberikan keluasan bagi terbuktinya potensi yang ada di desa tersebut.

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Oleh karena itu, desa mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa instruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD inilah yang harus menjadi roda

³Widjaja, *Otonomi Daerah...*, h.165

penggerak desa.⁴ Oleh sebab itu adanya BPD dapat membentuk BUMDES untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Otonomi desa dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintah menjadi lebih dekat, sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa dapat lebih mengetahui dan prioritas keinginan rakyat di desanya. Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Nomor 43 tahun 2014.

Melalui kedua peraturan perundang-undang tersebut ekonomi desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana desa yang merupakan unit pemerintah terdekat dengan rakyat diberikan keluasaan untuk berekstrasi. Pemerintah otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran dan serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antara desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga.

Konsekuensi desa harus mampu dan “mandiri” dalam menyelenggarakan pemerintah desanya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonomi selalu menggantung kehidupan pada subsidi pemerintah pusat.

Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu strategi dalam proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan

⁴Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

baik institusi maupun administrasi yang dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan peningkatan kuantitatif dan kualitatif pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan, yakni dari pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar hingga yang paling mutakhir yakni pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (objek sekaligus subjek) pembangunan. Selanjutnya Korten mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri harusnya merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuan sendiri.⁵

a. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengarahannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat

⁵Korten: Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Rakyat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, h. 242-245

menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administrasi. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan yang meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkeimbangan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.⁶ Pembangunan perdesaan berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kapasitas administrasi sehingga pemerintah dan masyarakat harus efektif guna meningkatkan kualitas hidup secara berkeimbangan.

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.⁷ Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merugikan nilai-nilai

⁶Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Rakyat Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pusataka Cidesindo, 1996, h.392

⁷*Ibid.* h.393

sosial. Konsep pembangunan ekonomi merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan *participatory, empowering and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan keputusan kebijakan publik.⁸ Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial dalam proses keputusan kebijakan publik.

Pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana menurut Cernea, menyatakan:⁹

“Bahwa pentingnya menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaatan yang diharapkan” Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terwujud jadi diri, harkat dan martabatnya secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki

⁸Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penfembangan Kehidupan Berdokumentasi di Indonesia*, Jakarta: LECPress, 3003, h.21

⁹Cernea, *Mengutamakan manusia di Dalam Pembangunan*, Jakarta: UI, 1988, h. 461.

empat akses yaitu:¹⁰ pemberdayaan masyarakat di pedesaan harus meningkatkan produktifitas kesempatan usaha atau memberi modal.

- a. Akses terhadap sumber daya.
- b. Akses terhadap teknologi
- c. Akses terhadap pasar
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk usaha bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Menurut Sumodiningrat menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertali erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:¹¹

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupa untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

¹⁰HAW Widjaja, *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Jakarta : Raja Grafindo,2003, h.169

¹¹Gunawan Sumodiningrat,*Membangun Perekonomian Rakyat*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.165

- 3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian peranan

BUMDES sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹²

Menurut Soejono Soekamto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:¹³

“Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Selama ini, pengembangan basis ekonomi di desa telah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun program tersebut masih belum membuahkan hasil yang diinginkan karena berbagai faktor, salah satunya yaitu intervensi dari pemerintah ke desa mengakibatkan terhambatnya daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa sehingga menyebabkan masyarakat mengalami ketergantungan akan bantuan dari pemerintah.

¹²[http://kbbi.web.id/pusat,\(diakses,22](http://kbbi.web.id/pusat,(diakses,22) oktober 2019 Puku:23.36)

¹³Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009,

Pendekatan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan ekonomi desa ialah pendirian lembaga ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini didirikan atas keinginan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada di desa. Selain itu, pendirian lembaga ekonomi ini memiliki tujuan mengurangi peran tengkulak yang menyebabkan biaya transaksi naik antara harga produk dari produsen ke konsumen akhir. Oleh sebab itu, dengan adanya lembaga ekonomi desa diharapkan setiap produsen yang menikmati selisih harga jual dan biaya produksi yang layak tanpa terbebani oleh tengkulak. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹⁴Lembaga ekonomi di dirikan atas keinginan masyarakat berdasarkan potensi yang ada di desa yang memiliki tujuan agar setiap produsen menikmati selisih harga jual dan produksi yang layak.

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, itu berarti pemenuhan modal usaha harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan Perundang-undang. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* menyatakan bahwa,

“BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDES sebagai lembaga

¹⁴David Wijaya, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, h.91-92

sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar”¹⁵

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi dalam hal ini sangat berhubungan kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sikap menjalankan bisnis suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dalam kemitraan mempunyai prinsip-prinsip yang mana telah dikemukakan oleh Candra yaitu sebagai berikut :

- a. Saling percaya dan menghormati
- b. Otonomi dan kedaulatan
- c. Saling mengisi
- d. Keterbukaan dan pertanggung jawaban.

Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik.¹⁶ Keberadaan BUMDES sebagai penguat ekonomi desa dan prinsip yang terjalin pemerintah, swasta maupun masyarakat berjalan dengan baik.

3. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan untuk pendirian BUMDES adalah :¹⁷

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

¹⁵Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*: Dapertemen Pendidikan Nasional, 2007, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, h.3

¹⁶Corista Berlian Ramadhan, Heru Ribawanto, *Suwondo, Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa*, jurusan h. 1072-1073

¹⁷Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana media, h.18

- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang jasa yang dikelola masyarakat dan PamDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga pelayanan yang berlaku standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalani oleh BUMDES.

4. Dasar dan Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDES diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa 132 sampai pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDES dalam hal ini adalah perusahaan desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Maka bisa dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDES dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak.¹⁸

5. Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES

Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembina terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

Q.S. Al- An'am 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali

¹⁸Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962

kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

Adapun beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut ;

a. BUMDES *Serving*

BUMDES *Serving*, mulai tumbuh secara incremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.

b. BUMDES *Banking*

BUMDES yang bertipe *banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

c. BUMDES *Brokering & Renting*

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan rekening listrik, dan juga pasar desa, ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam desa sendiri.

d. BUMDES *Trading*

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan Warga setempat.¹⁹ BUMDES trading yang berdagang

¹⁹Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Sprit Usaha Koleksi Desa*, Jakarta : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia, h.32

kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian untuk melayani kebutuhan warga setempat.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau sesuatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.²⁰

1. Kesejahteraan Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenang secara lahiriah maupun batiniah.²¹ Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial UU No. 11 tahun 2009.

Di antara tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangkai mencapai kemandirian.
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

²⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.887

²¹Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, EQUILIBRIUM, Vol.3, No.2, Desember 2015

- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya Untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.²²

- b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Contoh kesejahteraan masyarakat yaitu adanya budaya masyarakat. Budaya masyarakat seperti acara walimatul perkawinan. Dalam acara walimatul perkawinan terdapat budaya *delehi*. Delehi adalah kegiatan nyumbang saat mendatangi walimatul perkawinan dalam masyarakat. Hal ini dimasukkan agar orang yang mempunyai hajatan tidak banyak hutang, karena sumbangan yang diterima dari masyarakat. Secara umum dapat dikaitkan budaya walimatul perkawinan mampu meningkatkan dan memperdaya ekonomi

²²Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIP YKPN,2012).

masyarakat.²³ Kesejahteraan masyarakat seperti adanya budaya walimatul perkawinan yaitu dengan adanya delehi atau nyumbang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama Islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya.²⁴ Kesejahteraan adalah bagian dari yang diajarkan oleh agama Islam dalam bidang ekonomi.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

a. Qs. Al-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman

²³Muyassarah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (walimatul'urusy) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang*.Desember 2016

²⁴Agung Eka Purwana,*Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica Vol.11/No.1/jan,-juni 2014.

kepadanya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Menurut Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.²⁵

3. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan, Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.²⁶ Kesejahteraan menurut ekonomi Islam menjadi sumber aturan perilaku manusia dan kehidupan yang baik serta terpenuhinya kebutuhan spiritual.

²⁵Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Pers, h. 102

²⁶Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.17.

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau jenisnya, misalnya adalah kesejahteraan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya. Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.”²⁷ Menurut Al-Ghozali memiliki 5 tujuan dasar yaitu agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal.

Sedangkan menurut P3EI yang mengemukakan teori Umar Charpra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:²⁸

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan material yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual

²⁷Adiwarman.A.Karim,*Ekonomi Mikro Islam*,Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h.62.

²⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),*Ekonomi Islam*,,Jakarta :Rajawali Press,2009, h.2

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Adalah Kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Ekonomi Islam yang memiliki empat nilai utama, yaitu Ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam adalah:²⁹

a) Ekonomi Ilahiyyah

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produktif, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian

²⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.91

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

b) Ekonomi Akhlak

Yaitu ekonomi yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Seseorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan mengonsumsinya tetapi terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya.

c) Ekonomi Kemanusiaan

Merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi.

d) Ekonomi Pertengahan

Merupakan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal hati, antara realita dan fakta.

4. Indikator Kesejahteraan

a. Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Indikator kesejahteraan secara umum meliputi :³⁰ menurut BKKBN ada 4 indikator pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan.

1) Pendapatan

³⁰Sub Direktorat Statitik, *Analisis dan pembangunan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistika, 2008, h.4

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

- a. Tinggi (Rp,>5.000.000)
- b. Sedang (Rp 1.000.000-Rp5.000.000)
- c. Rendah (<Rp.1.000.000)

2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga , dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makan akan jauh lebih kecil dibanding persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan

sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperoleh secara besar-besaran.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antara Negara adalah *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).³¹ Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

b. Indikator kesejahteraan Secara Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli buku P3EI, indikator kesejahteraan Islam Adalah :³²

“ Terpenuhiya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridho dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”

Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhi kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan Islam Al-Syathibi yaitu:³³ kesejahteraan dalam Islam

³¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia, h.13

³²*ibid*

³³Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Syathibi tentang Masalah dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012

tidak diukur dengan kebutuhan materi saja tetapi harus kebutuhan spiritualnya.

1) *Al-Dharuiyah*(Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyah* ini dalam buku usul fiqih, termasuk As-syathibi, membagi menjadi lima hal, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri, kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta yang dikuasai atau dimiliki seseorang.³⁴

2) *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu suatu kebutuhan dimana apabila tidak terwujud kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepenuhan atau sama sekali tidak berdaya, dapat dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.³⁵

3) *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Adalah suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkat kebutuhan sebelumnya, ia bersifat

³⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Priamamitra Media, 2012, h.40

³⁵Muhammad Thollah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Pres, 2005, h.163.

pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.³⁶

³⁶Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 2009, h. 79.

BAB III
GAMBARAN UMUM BUMDES WAHYU URIP di Desa Trimulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

A. Profil Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis

Secara letak geografis desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati merupakan daerah dataran rendah, sesuai dengan topografinya terletak pada 8,75 meter di atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 1,399 mm/tahun.

Dengan Batas-batas Desa Trimulyo

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Desa Raci dan Desa Ngening

Sebelah Selatan : Desa Ketip dan Desa Pekuwon

Sebelah Barat : Desa Bendar dan Bumirejo

Dengan Luas Wilayah Desa Trimulyo : 469 Ha yang terdiri dari :

Tanah Sawah : 110 Ha

Tanah Tambak Asli : 135 Ha

Tanah Tambak Sawah : 138 Ha

Tanah Permukiman : 86 Ha

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk desa Trimulyo menurut jenis kelamin pada tahun 2018 sebesar 4.408 jiwa dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Trimulyo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.210
2	Perempuan	2.198
Jumlah Keseluruhan		4.408

Sumber Data : Arsip Data Desa Tahun 2018

Jumlah penduduk desa Trimulyo hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 4.408 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, yakni terdiri dari 2.210 laki-laki dan 2.198 perempuan.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dan jumlah penduduk 4.408 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar 18-56 tahun.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Sendiri	246 Orang
2	Petani Penggarap Tanah	41 Orang
3	Pengrajin Industri Kecil	10 Orang
4	Nelayan	933 Orang
5	Guru Swasta	151 Orang
6	Buru Bangunan	23 Orang
7	Pedagang	27 Orang
8	Pegawai Negeri Sipil	31 Orang
9	Polri	6 Orang
10	TNI	1 Orang
11	Lain-Lain	2.939 Orang
Total Keseluruhan		4.408 Orang

Sumber Data : Arsip Data desa Tahun 2018

Dilihat dari mata pencahariannya, penduduk desa Trimulyo mempunyai mata pencaharian yang cukup beragam. Pada umumnya penduduk desa setempat bekerja dibidang pertanian dan nelayan. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh tani 419 orang, petani 246 orang, nelayan 933 orang, buruh swasta 151 orang, buruh bangunan

23 orang, pedang 27 orang, pegawai negeri sipil 31 orang, pengrajin industri kecil 10 orang, polri 6 orang, TNI 1 orang dan lain-lain sebanyak 2.939 orang.

Tabel 3.3
Rata-rata Pendapatan Penduduk

No	Besaran Pendapatn Perbulan	Prosentase
1	< Rp. 1.000.000,-	54%
2	Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000	42%
3	> Rp. 5.000.000,-	4%

Sumber : Arsip Data desa Tahun 2018

Faktor kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dari data pendapatan penduduk. Dari data diatas bahwa rata-rata pendapatan penduduk untuk masyarakat sejahtera sebesar 4% dengan pendapatan lebih dari Rp.5.000.000 sedangkan untuk masyarakat kurang sejahtera dengan pendapatan perbulan kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 54%. Dan untuk masyarakat berkecukupan dengan pendapatan Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000 (42%).

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	950
2	SD	455
3	SLTP/SMP	750
4	SLTA/SMA	496
5	Akademik/D1-D3	51
6	Sarjana	57
Jumlah Keseluruhan		2.759

Sumber Data: Arsip data Desa Trimulyo Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa tingkat pendidikan terbesar pada pendidikan anak usia dini 950 orang, tingkat SD 455 orang, tingkat SMP 750 orang, tingkat SMA 496 orang, D1/D3 51 orang dan sarjana 57

orang. Jadi jumlah keseluruhan tingkat pendidikan di desa Trimulyo sebanyak 2.759 orang.

4. Kondisi Keberagamaan

Rumah adalah tempat perlindungan dan berkumpul bagi keluarga setelah melakukan aktivitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Dari jumlah penduduk 4.408 jiwa penduduk yang beragama Islam 90%, suasana kehidupan beragam bagi masyarakat desa Trimulyo cukup baik, rukun, tenang dan tentram, saling menghormati, tolong menolong, dalam menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai adapun jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut.

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	4.390 Orang
2	Kristen	12 Orang
3	Konghuju	6 Orang
4	Kepercayaan Sapdodarmo	5 Orang
Jumlah Total		4.408 Orang

Sumber Data : Arsip data Desa Trimulyo 2018

Mayoritas penduduk desa Trimulyo beragama Islam yaitu 4.390 orang. Selanjutnya beragama Kristen yaitu dengan jumlah 12 orang, yang beragama Konghuju sebesar 5 orang, dan yang menganut Kepercayaan Sapdodarmo 5 orang.

Tabel 3.6
Sarana Peribadatan di desa Trimulyo

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushollah	17

Sumber Data: Arsip data Desa Trimulyo Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa di desa Trimulyo mempunyai satu Masjid yang terletak di RT 01. Dan 17 musholla dari 4 RW, yang setiap RWnya terdapat kurang lebih 4 mushollah. Letak 17 mushollah tersebut rata-rata per RT ada satu mushollah.

B. Gambaran Umum BUMDES WAHYU URIP di Desa Trimulya Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Organisasi di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah desa Trimulyo telah membuat peraturan desa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tugas dan tanggungjawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan pemerintah Desa Trimulyo.

2. Tujuan Pembentukan BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu :

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa;
- b. Menciptakan kesempatan berusaha;
- c. Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan;
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa;

- f. Memberikan kesempatan usaha; dan
- g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.¹

3. Struktur Kepengurusan BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Kepengurusan BUMDES Wahyu Urip terdiri dari :

Komisaris	: Kepala Desa Trimulyo
Dewan Pengawas	: 1. Rakito 2. Purnawi 3. Sunardi
Direktur	: Siti Susilowati
Sekretaris	: Ika Ratna S
Bendahara	: Tarwati ²

1. Adapun Tugas dan wewenang

a. Komisaris / Kepala Pengawas

Komisaris/Pengawas mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksanaan operasi atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan operasional setiap akhir tahun.
- 2) Meminta laporan kegiatan unit-unit usaha milik desa.
- 3) Meminta laporan rincian neraca, laba rugi dan penjelasan-penjelasan atau dokumentasi kegiatan unit-unit usaha.
- 4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksanaan operasional.

b. Direktur

Direktur mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya badan usaha milik desa.

¹Dokumentasi BUMDES 2018

²Dokumentasi , *Struktur Organisasi Pengurus BUMDES 2018*

Adapun tugasnya adalah

- 1) Memimpin organisasi BUMDES
- 2) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
- 3) Melakukan pengadilan kegiatan BUMDES
- 4) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa
- 5) Mengkoordinasi seluruh tugas pengelolaan BUMDES baik dalam maupun luar
- 6) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- 7) Melaporkan keadaan keuangan BUMDES setiap triwulan melalui musyawarah desa.
- 8) Melaporkan keuangan BUMDES akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban.

c. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDES, diantaranya :

- 1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan direktur
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDES
- 4) Melaksanakan Administrasi pembukuan keuangan BUMDES
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan unit usaha BUMDES
- 6) Mengelola surat-menyurat secara umum
- 7) Melaksanakan kearsipan
- 8) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDES

d. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDES diantaranya :
Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDES.

- 1) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDES.
- 2) Menyusun pembuktian penerima dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDES.
- 3) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
- 4) Pengelola belanja dan pengadaan barang/ jasa unit usaha BUMDES.
- 5) Pengelolaan penerima keuangan unit usaha BUMDES
- 6) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDES
- 7) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDES yang sesungguhnya.
- 8) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 9) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan
- 10) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur

e. Ketua Unit Usaha

Ketua unit usaha masing-masing mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDES yang dipimpin.

Adapun tugasnya

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada direktur
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.

- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan diunit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik.
 - 4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
 - 5) Memberi usul kepada direktur untuk mengangkat tenaga pendukung atau tenaga teknis yang diperlukan
 - 6) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan bendahara
 - 7) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
- f. Karyawan

Karyawan di BUMDES Wahyu Urip mempunyai tugas melayani anggota yang ingin menggunakan jasa BUMDES. Karyawan juga harus mengerti tentang konsep Syari'ah, karena banyak kinerja berkaitan dengan pembiayaan berpola syariah.

4. Visi Misi BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

- a. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
- b. Menciptakan kesempatan berusaha.
- c. Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
- f. Memberikan kesempatan usaha, dan
- g. Memberikan lapangan pekerjaan.³

C. Unit Kegiatan Usaha BUMDES Wahyu Urip di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Pemerintah desa Trimulyo membentuk BUMDES sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDES juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki

³*ibid*

desa Trimulyo. BUMDES ini berdiri pada tanggal 07 Desember 2015. Serta dilengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undang sampai tahun 2019 kurang lebih BUMDES Wahyu Urip telah berjalan 4 tahun. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki BUMDES juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Wahyu Urip :

1. Unit Usaha dibidang Konstruksi

Bentuk usaha dibidang konstruksi ini berupa pengelolaan pasar desa. Pasar desa yang terdapat pada BUMDES ini bertujuan untuk membantu pembeli, unit pengelolaan pasar ini sudah ada sebelum adanya BUMDES dan sekarang dikelola oleh pemerintah desa kepada BUMDES untuk dikelola sehingga dapat berjalan dengan baik.

Penyewaan ruko-ruko ini dihitung per 5 tahun dengan biaya sewa Rp 15.000.0000/ruko, ini sudah biaya bersih disetorkan ke BUMDES, dengan adanya unit usaha ini dirasa sangat membantu baik untuk pemasukan BUMDES maupun masyarakat desa itu sendiri, banyak masyarakat desa yang menyewa ruko itu. Tidak hanya itu, ruko-ruko itu juga disewakan di desa-desa lain .

2. Unit usaha peminjaman modal

Pada unit usaha BUMDES memberikan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Cara pengembangan usaha dan pengelolaan dana pinjam untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDES adalah dana dari desa yang merupakan hasil dana terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDES. Masyarakat diberi pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya.

Setiap peminjaman yang dilakukan dikenakan 5% untuk BUMDES dengan waktu maksimal tempo selama 3 bulan, pengenaan 5% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan peminjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjam utuh. Namun unit usaha peminjaman modal ini belum berjalan baik, karena disamping

keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDES dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

D. Peran BUMDES Wahyu Urip terhadap masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Keberadaan BUMDES di desa Trimulyo diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, meskipun BUMDES Wahyu Urip ini baru beroperasi 2 tahun dan baru memiliki beberapa unit usaha saja namun peranan BUMDES yang dijelaskan menurut Bu Ika ialah BUMDES Wahyu Urip ini telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa untuk memperoleh modal usaha maupun jasa pelayanan lainnya, seperti yang diterangkan beliau:

“Peranan BUMDES sangat baik terbukti BUMDES Wahyu Urip ini mampu terus berkembang meskipun belum terlalu signifikan, Peranan yang lain dengan BUMDES berdiri adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan prosedur yang mudah, jasa pelayanan dan juga penyewaan ruko.”⁴

Peran BUMDES dapat dirasakan oleh masyarakat, kehadiran BUMDES Wahyu Urip di Desa ini, sangat membantu sekali bagi Masyarakat Desa. Seperti keterangan salah satu masyarakat Desa sebagai berikut:

“ Saya merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDES, dengan begitu mau beli sembako relatif murah , meskipun belum terlalu banyak namun sedikit membantu kami sebagai masyarakat”⁵

Dari hasil wawancara dengan informasi-informasi diatas dapat diketahui bahwa berdirinya BUMDES “Wahyu Urip” di Desa Trimulyo ini memberikan masyarakat desa terhadap akses.

⁴Ika Ratna S, Sekretaris Trimulyo, wawancara, 27 september 2019.

⁵Ngatini, Masyarakat Desa Trimulyo, wawancara, 29 september 2019.

E. Kontribusi BUMDES Wahyu Urip terhadap masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Peminjaman Bergulir

Peminjaman bergulir merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDES yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDES kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 3 bulan saja. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peminjam modal menerangkan bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatan, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“ Saya memilih usaha warung kecil-kecilan ini sebelum adanya BUMDES, dan kemarin saya ingin mengembangkan usaha saya, dan mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDES dan setelah mengembangkan usaha saya pendapatannya meningkat”⁶

Dengan adanya peminjaman modal pada BUMDES Wahyu Urip ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal BUMDES Wahyu Urip ini dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai usaha.

2. Membuka Lapangan Pekerjaan

BUMDES juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan dapat bekerja di BUMDES, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDES sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di desa Trimulyo dengan memberikan lapangan pekerjaan. Terdapat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti yang dipaparkan oleh ibu susu:

⁶Pami, Peminjaman Modal BUMDES, wawancara, 28 september 2019.

“Saya merupakan Masyarakat desa yang sudah selesai sekolah dan sudah hampir 3 bulan bekerja di BUMDES, Saya Merasa terbantu dengan adanya BUMDES, karena bisa membantu biaya kehidupan saya sehari-hari”⁷

Namun dapat kita ketahui kontribusi yang diberikan BUMDES Trimulyo dalam hal membantu lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dan hampir 2 tahun berjalannya BUMDES hanya sebanyak 2 orang saja masyarakat desa yang dapat bekerja di BUMDES mengingat BUMDES ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.

⁷Wawancara Karyawan BUMDES Wahyu Urip, Pada 28 september 2019 pukul 10.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BUMDES merupakan suatu badan usaha yang telah menyebar di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah salah satunya BUMDES telah hadir di Kabupaten Pati. Disini telah banyak desa yang memiliki BUMDES, seperti di desa Trimulyo ini, BUMDES disini telah beroperasi kurang lebih 5 tahun dengan modal awal yaitu pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 20.000.000. Sedangkan pada tahun kedua tahun 2016 yaitu sebesar Rp.50.000.000. Yang berasal dari 10% dana desa (DD). Modal ini diberikan kepada BUMDES untuk dikelola dalam membentuk maupun mengembangkan unit-unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDES. Berdasarkan teori yang telah peneliti paparkan di bab II, adapun klasifikasi jenis unit usaha BUMDES sebagai berikut:

1. Peran dan Kontribusi BUMDES di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
 - a. BUMDES *Trading*

BUMDES *Trading* merupakan BUMDES yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh banyak di desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa. Di BUMDES Wahyu Urip sudah terdapat jenis usaha yaitu adanya penyediaan kebutuhan sembako, seperti minyak, gula, beras, gas dan lain-lain. Toko sembako ini juga merupakan tempat penitipan produk masyarakat seperti keripik dan sebagainya. Toko sembako yang ada di BUMDES Wahyu Urip ini belum berjalan lama, baru sekitar 5 bulanan saja sehingga produk-produk ataupun barang yang dijual di toko sembako BUMDES ini pun belum terlalu banyak atau belum lengkap.

Pemasukkan BUMDES dari unit usaha *Trading* atau penjualan sembako ini masih belum terlalu berpengaruh bagi pendapatan BUMDES karena hasil penjualan dari toko sembako masih digunakan untuk menambah perlengkapan barang-barang yang ada di toko sembako BUMDES. Jadi pemasukan BUMDES dari unit usaha ini dikatakan masih belum berpengaruh bagi pendapatan/kas BUMDES.

b. BUMDES *Serving*

BUMDES *Serving* mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidak mampuan sebagai besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAMDES. Karena ini pengelolaan air bersih oleh BUMDES merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan dari masyarakat yang anonim kepada desa. Kehadiran BUMDES itu melahirkan otoritas dan tata kelola air bersih yang di gerakkan oleh desa.

Di desa Trimulyo jenis usaha BUMDES modal *Serving* ini belum diterapkan, dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan, karena dari hasil wawancara penelitian dengan pengurus BUMDES yaitu bapak purnawi, beliau menjelaskan bahwa:

“BUMDES Serving belum ada ataupun belum diterapkan di BUMDES Wahyu Urip, karena kami merasa ketersediaan air bersih di desa ini masih terbilang cukup, jadi kami lebih memfokuskan kepada unit usaha yang lain seperti kami akan memajukan unit usaha desa.”¹

Dari hasil penjelasan beliau, dapat kita ketahui bahwa pada BUMDES Wahyu Urip tidak ataupun belum menjalankan usaha *Serving* ini karena ketersediaan air bersih di desa Trimulyo masih terbilang cukup baik sehingga pengurus BUMDES Wahyu Urip lebih memprioritaskan kepada pengembangan unit usaha yang sudah ada

¹Purnawi. Pengurus BUMDES, *wawancara*. 12 November 2019.

maupun membentuk unit usaha yang dirasakan lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa yakni seperti memajukan unit usaha pasar desa.

c. *BUMDES Brokering*

BUMDES Brokering merupakan BUMDES yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar ataupun BUMDES yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contohnya seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp dan lain sebagainya.

Jenis usaha *Brokering* ini belum diterapkan, dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang di rencanakan, karena dari hasil wawancara penelitian dengan pengurus BUMDES yaitu ibu Ika, beliau menjelaskan bahwa:

*“BUMDES Brokering belum ada ataupun belum diterapkan di BUMDES Wahyu Urip, karena kami merasa jasa pembayaran listrik, PAM, Telp di desa kami udah banyak yang membuka jasa pembayaran listrik jadi kami lebih memfokuskan kepada unit usaha yang lain seperti kami akan memajukan unit usaha desa”*²

Dari hasil penjelasan beliau, dapat kita ketahui bahwa pada BUMDES Wahyu Urip tidak ataupun belum menjalankan usaha *Brokering* ini karena jasa pembayaran listrik, PAM, Telp di desa Trimulyo masih terbilang sudah cukup banyak sehingga pengurus BUMDES Wahyu Urip lebih memprioritaskan kepada pengembangan unit usaha yang sudah ada maupun membentuk unit usaha yang dirasakan lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa yakni seperti memajukan unit usaha lainnya.

d. *BUMDES Renting*

BUMDES Renting adalah BUMDES yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan

²Ika . Seketaris BUMDES, wawancara. 12 November 2019.

dibanyak desa, terutama desa-desa yang ada dipulau jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah maupun penyewaan mesin mollen.

Dalam BUMDES Wahyu Urip belum terdapat unit usaha *Renting*, dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan, karena dari hasil wawancara penelitian dengan pengurus BUMDES yaitu Bapak Udin, beliau menjelaskan bahwa :

“BUMDES Renting belum ada ataupun belum diterapkan di BUMDES Wahyu Urip, karena di daerah kami banyak mesin mollen yang disediakan dari setiap diadakan proyek. Jadi kami memfokuskan kepada unit lain mungkin kedepannya kami akan membentuk unit usaha foto copy.”³

Dari hasil penjelasan beliau, dapat kita ketahui bahwa pada BUMDES Wahyu Urip belum menjalankan usaha *Renting* ini di karenakan di desa Trimulyo kalau minjam mesin mollen itu udah dari proyeknya. Jadi BUMDES Wahyu Urip memfokuskan unit lain yakni seperti mendirikan unit *foto copy*.

e. *BUMDES Banking*

BUMDES Banking adalah BUMDES yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari pada rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: bank desa atau lembaga pengkreditan atau lembaga mikro desa, unit usaha dana bergulir maupun pinjaman modal.

Didalam BUMDES Wahyu Urip telah ada unit usaha *Banking*, yaitu dalam hal peminjaman uang kepada masyarakat. Ini dimaksud agar masyarakat lebih muda untuk meminjam uang. Dari hasil wawancara Ibu Susi beliau menjelaskan bahwa unit usaha

³Udin. Pengurus BUMDES, wawancara. 12 November 2019.

peminjaman uang yang ada dalam BUMDES ini sudah berjalan kurang lebih empat tahun lamanya seperti penjelasan sebagai berikut:

“Unit usaha peminjaman uang yang ada di BUMDES Wahyu Urip ini udah berjalan kurang lebih empat tahun ini, unit usaha peminjaman ini alhamdulillah udah berjalan baik, karena modal yang dimiliki BUMDES dirasa cukup baik.”⁴

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa unit usaha peminjaman uang ini telah berjalan di BUMDES Wahyu Urip dan berjalan dengan baik.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUMDES Wahyu Urip ini kurang lengkap yaitu hanya tersedia unit *Trading* dan *Banking*. Sedangkan dalam teori di Bab II terdapat 5 unit yang harus ada di BUMDES yakni *Banking*, *Brokering*, *Renting*, *Trading*, dan *Serving*.

Pada unit *Banking* merupakan pemasukan yang paling besar untuk pendapatan BUMDES Wahyu Urip. Sedangkan untuk pendapatan unit *Trending* tidak digunakan untuk pemasukan BUMDES yakni hanya untuk melengkapi produk-produk yang ada di unit tersebut. Untuk unit usaha *Trading* maupun *Banking* masih terus mengalami perkembangan, karena dapat kita ketahui unit usaha *Trading* ini merupakan unit usaha yang baru dijalankan oleh BUMDES Wahyu Urip sedangkan unit usaha *Banking* sudah berjalan dengan lancar.

Setelah peneliti paparkan mengenai klasifikasi unit usaha yang ada pada BUMDES berdasarkan teori, peneliti juga ingin menghubungkan unit-unit usaha tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Trimulyo. Menurut Todara dan Stephen Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

⁴Susi, Pengurus BUMDES, wawancara. 12 November 2019.

- 1) Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, perlindungan.
 - 2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik.
 - 3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan social individu dan bangsa.
2. Kesejahteraan Masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Terhadap berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya, yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

- a) Tinggi (Rp,>5.000.000)
- b) Sedang (Rp 1.000.000-Rp5.000.000)
- c) Rendah (<Rp.1.000.000)

Sebagian besar masyarakat desa Trimulyo berprofesi sebagai nelayan, jumlah nelayan saat ini adalah 933. Selain nelayan masyarakat desa Trimulyo memiliki pekerjaan yaitu petani, guru swasta, buru bangunan, pedagang, pegawai negeri sipil, polri, TNI dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil dari suaminya. Berikut merupakan hasil wawancara desa Trimulyo yang tidak bergabung di dalam unit usaha BUMDES sebagai berikut:

“Saya seorang nelayan, penghasilan saya dari nelayan alhamdulillah cukup untuk makan kami bertiga, saya, istri saya dan satu lagi anak saya, dan juga saya dibantu oleh anak saya yang

lain yang telah menikah mereka sering mengirim uang untuk membantu keperluan kami ini”

Dari hasil wawancara dan observasi penelitian dengan informan-informan yang ada di dusun Trimulyo sebagian besar masyarakat penghasilan perbulan kurang dari Rp. 1.000.000, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di desa Trimulyo adalah nelayan. Sehingga masih banyak masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang berpendapatan sedang perbulannya berkisar kurang lebih Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000. seperti penjelasan salah satu masyarakat yaitu, ibu Darwatic selaku masyarakat desa yang tidak berperan aktif dalam BUMDES menyatakan bahwa:

“Saya hanya ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai guru swasta di salah satu sekolah desa Trimulyo. Meskipun tidak berlebihan alhamdulillah pendapatan dari suami saya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami”⁵

Tidak hanya itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada masyarakat yang bergabung dalam unit usaha BUMDES Wahyu Urip yakni peminjaman uang salah satunya ibu Siti, menjelaskan bahwa:

“Saya mempunyai toko di depan rumah, dulu saya kekurangan uang untuk memberi keperluan yang di toko. Sehingga saya memutuskan meminjam uang di BUMDES Wahyu Urip, setelah saya melakukan peminjaman uang tersebut alhamdulillah pendapatan saya meningkat yang tadinya hanya maksimum Rp.500.000 kini bisa dapat Rp. 7.000.000 bahkan bisa lebih”⁶

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDES Wahyu Urip ini belum memiliki peran yang lebih dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang penghasilan rendah kurang dari Rp. 1.000.000, namun bagi masyarakat yang melakukan peminjaman uang di

⁵darwatic. Masyarakat desa ,wawancara. 12 November 2019.

⁶Siti. Masyarakat Desa, wawancara. 12 November 2019.

BUMDES Wahyu Urip pendapatan meningkat yaitu yang dari Rp.500.000 sampai Rp. Rp. 700.000 bahkan bisa lebih. Ini menunjukkan adanya ketimpangan di dalam masyarakat dalam hal pendapatan. Hal ini berarti pemerintahan desa walaupun telah membentuk lembaga perekonomian untuk membantu mensejahterakan masyarakat, tetapi belum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakatnya, terutama bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi di dalam BUMDES Wahyu Urip.

Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, pendidikan serta kesehatan. Pendapatan desa Trimulyo sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, namun belum sampai tahap menyetor uang untuk *saving* atau menabung bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Bagi masyarakat desa Trimulyo yang berpenghasilan rendah tentu memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas yang dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat.

Peran BUMDES Wahyu Urip sangat membantu masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di pasar desa yang disediakan BUMDES Wahyu Urip dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu jauh-

jauh harus ke luar desa. Seperti keterangan salah satu masyarakat desa ibu Yun sebagai berikut:

“Sekarang kalau beli kebutuhan sehari-hari seperti sembako sudah tersedia di pasar BUMDES jadi tidak perlu lagi pergi keluar desa, harganya pun juga sama dengan pasar di tempat lain”

Tidak hanya terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sembako, di BUMDES Wahyu Urip juga terdapat pupuk untuk para petani tidak perlu jauh-jauh keluar desa untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Seperti keterangan salah satu petani bapak Jasmin menjelaskan bahwa:

“Dulu saya kalau mau beli pupuk harus keluar desa ke juwana ataupun desa raci. Sekarang semenjak ada BUMDES Wahyu Urip tidak perlu lagi keluar desa yang memakan waktu dan bahan bakar”⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terlihat bahwa BUMDES Wahyu Urip berperan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh harus keluar desa yang memakan waktu dan bahan bakar.

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan pada masing-masing masyarakat tidak dapat ditentukan dalam hitungan rupiah. Masyarakat mengaku bahwa pengeluaran non pangan lebih besar dibanding pengeluaran untuk pangan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak, untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak untuk cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan tidak dengan bantuan orang lain. Di Indonesia telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 12 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMA/SMK, oleh karena itu masyarakat desa Trimulyo menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi sebagian masyarakat desa Trimulyo hanya sampai ditingkat pendidikan SD, selain itu juga dilihat data yang

⁷jasmin. Masyarakat desa, wawancara. 12 November 2019.

terkait di desa Trimulyo tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma, S1, S2, S3. Adapun yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah di desa Trimulyo ini secara keseluruhan bersekolah semua meskipun hanya ada ke jenjang SLTP saja. Seperti diterangkan Bapak Selamat yaitu:

“alhamdulillah semua anak saya bersekolah semua walaupun hanya sampai jenjang SMP selanjutnya anak saya bekerja sebagai nelayan.”⁸

Selain itu dari penjelasan masyarakat yang lain masyarakat yang lain menerangkan bahwa pendidikan yang dijalani oleh anak-anaknya sampai ke jenjang SLTA seperti pada penjelasan Ibu Darmi yaitu:

“alhamdulillah anak saya semuanya sampai lulus SMA di batang, kalau ada risiko insyaallah mau lanjut ke perguruan tinggi”⁹

Dari jawaban masyarakat desa diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Trimulyo terbilang sudah cukup baik maupun masyarakat menerapkan pendidikan minimal 12 tahun namun ada yang melanjutkan perguruan tinggi meskipun tidak banyak.

Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang dipenuhi maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.

BUMDES Wahyu Urip sudah banyak mendorong pendidikan tinggi masyarakat, karena operasional lembaga perekonomian lima

⁸Selamat, Masyarakat desa, wawancara. 12 November 2019.

⁹Darmi . Masyarakat desa, wawancara. 12 November 2019.

tahun ini cukup baik kontribusinya. Unit usaha yang dikelola BUMDES menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat desa Trimulyo untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, pendidikan khusus anak-anak hanya sampai tingkat SMA, sedangkan yang masuk perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif sejarah sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya, sandang, pangan, dan kesehatan sehari.

Kesehatan masyarakat desa Trimulyo secara umum cukup baik, sudah ada posyandu di masing-masing RW, puskesmas dan juga sudah ada praktik bidan. Menurut hasil wawancara kepala desa Trimulyo kesehatan masyarakat di desa ini cukup baik tidak ada menunjukkan angka terkena gizi buruk. Seperti yang dijelaskan bapak Dalio.

“Kesehatan masyarakat disini baik, dengan didukung adanya puskesmas, posyandu, dan bidan. Dan juga di desa Trimulyo telah menerapkan program berencana yaitu keluarga berencana (KB). Oleh karena itu desa ini disebut desa atau kampung KB. Hanya saja selaku pemerintahan desa terus berupaya meningkatkan hasilitas kesehatan yang ada di desa trimulyo agar kesehatan masyarakat lebih terjamin.”¹⁰

Dilihat dari hasil wawancara kepala desa, sarana kesehatan di desa Trimulyo cukup tersedia, kebutuhan akan obat-obatan masyarakat tersedia di puskesmas maupun warung. Kecuali bila memiliki penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter maka harus dibawa ke rumah sakit. Namun fasilitas yang di puskesmas masih kurang dan terus mengalami perbaikan.

Dalam indek kesehatan BUMDES Wahyu Urip tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha langsung menjurus pada

¹⁰Dalio. Kepala Desa, wawancara. 12 November 2019.

bidang kesehatan, melihat tingkat kesehatan masyarakat desa Trimulyo sendiri sudah cukup baik.

B. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa. Guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wahyu Urip di desa Trimulyo kecamatan juwana sebagaimana di uraikan sebelumnya, dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman uang, pasar desa dengan adanya penyediaan sembako, dan penyewaan ruko-ruko sehingga BUMDES telah berperan aktif bagi masyarakat meskipun belum maksimal .

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْيِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَٰكُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam*

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Selain itu, pinjaman uang yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk membantu masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Demikian juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntut orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman allah dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDES memang banyak memberi kemudahan bagi masyarakat desa Trimulyo. Pengelolaan BUMDES Wahyu Urip di desa Trimulyo ini dikatakan dikelola secara syariah. Dapat di ketahui unit usaha peminjaman uang di BUMDES Wahyu Urip dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah*

adalah akad kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* dimana dana 100% dari *shahibul mal*, sedangkan untuk *mudharib* mengelola dana tersebut secara bebas dalam jenis usahanya. Untuk akad kerja samanya dilakukan di awal perjanjian sehingga tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Sedangkan untuk keuntungan menggunakan bagi hasil yang dilakukan sesuai perjanjian diawal, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat mujamil ayat 20.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa Allah menghalalkan *mudharabah* karena di dalam ekonomi Islam, hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil. Sistem ekonomi bagi hasil (*mudharabah mutlaqah*) merupakan solusi dalam perekonomian islam.

Menjalankan suatu usaha tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Selain itu juga dalam kegiatan ekonomi harus memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha dan orang sekitar. Prinsip dasar etika Islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu:¹¹

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian Islam kepada seluruh umat manusia, baik menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun masyarakat sekitar. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan, dan kondisi sosial. Praktek dalam bisnisnya yaitu:

1. Terdapat kesamaan perlakuan
2. Kesamaan hak kompensasi
3. Tidak adanya pihak yang dirugikan

¹¹Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Fokus Ekonomi. Vol 9 No.1

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDES memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya setiap masyarakat dapat bergabung atau ikut serta dalam unit usaha BUMDES salah satunya yaitu peminjaman uang, siapapun bisa melakukan peminjaman uang di BUMDES Wahyu Urip dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMDES.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan dan kemudahan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktifitas bisnis. Praktiknya dalam bisnis:

1. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah.
2. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini juga BUMDES telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat desa Trimulyo memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakni tidak ada yang menghalangi orang lain menjalani praktek ibadahnya, selama tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Merupakan pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang lain dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta masyarakat satu antara yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya yaitu:

1. Upah harus sesuai
2. Pemberian upah harus tepat waktu

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam BUMDES dalam hal ini sesuai dengan prinsip yang ketiga yaitu tanggungjawab. Dalam praktiknya BUMDES Wahyu Urip memberikan upah tepat waktu kepada pengurus BUMDES yaitu dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan jumlah atau nominal yang telah di tetapkan dan disepakati BUMDES.

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam *As-Syathibi* membagi kebutuhan dasar menjadi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu *al-dharuriyah* (Kebutuhan Sekunder) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki oleh diri manusia. Memenuhi kebutuhan juga telah Allah firmankan pada Q.S Fussilat ayat 10 yang berbunyi:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِينَ
 Artinya: “*dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.*”

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer). *Ah-hijjayah* yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Dan *al-tshaniyyah* adalah kebutuhan perlengkapan atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Dengan demikian masyarakat desa Trimulyo tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhan menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaan atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDES Wahyu Urip ini tetap mengikuti syariat-syariat Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wahyu Urip dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor rill yaitu, penyediaan pasar desa dengan adanya toko sembako, toko pupuk dll. Serta terdapat peminjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk usaha. Kontribusi BUMDES dilihat dari indikator yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan maupun pengeluaran. Peran maupun kontribusi BUMDES Wahyu Urip ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di desa Trimulyo ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antara masyarakat desa Trimulyo.
2. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan penyediaan sembako yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wahyu Urip adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat, maka dari itu agama memperoleh hal tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat desa Trimulyo telah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan *al-dharuriyah*, *al-hajjiyah*, dan *al-tahsinniyyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDES kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
2. Untuk pengurus BUMDES Wahyu Urip diharapkan untuk lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap masyarakat desa Trimulyo seperti memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusannya. Serta mengembangkan dan memperluas unit usaha yang terdapat di BUMDES Wahyu Urip
3. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pengembangan BUMDES dengan melalui supervisi, pendamping dan fasilitas sehingga diharapkan BUMDES dapat lebih berperan dan berkontribusi bagi desaa maupun masyarakat.
4. Untuk para akademi diharapkan lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman.A.Karim,*Ekonomi Mikro Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Afifuddin bin Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV, Pustaka Setia, 2009.
- Agung Eka Purwana,*Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica Vol.11/No.1/jan,-juni 2014.
- Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penfembangan Kehidupan Berdokumentasi di Indonesia*, Jakarta: LECPess, 3003.
- ahthurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al Yasa' Abubakar,*Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Priamamitra Media,2012.
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Sprit Usaha Koleksi Desa*, Jakarta : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Cernea, Mengutamakan *manusia di Dalam Pembangunan*, Jakarta: UI, 1988.
- Corista Berlian Ramadhan, Heru Ribawanto, *Suwondo, Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa*, jurusan.
- David Wijaya, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Eddy Yusuf Angunggunanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol.13 No. 1 Maret 2016.
- Feni Yudanti,*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. Fakultas. Ilmu Sosial dan Ilmu
- Gunawan Sumodiningrat,*Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- H.A.W, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang dan utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003

- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Jakarta : Raja Grafindo,2003.
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- [http://kbbi.web.id/pusat,\(diakses,22](http://kbbi.web.id/pusat,(diakses,22) oktober 2019 Puku:23.36)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana,2012.
- Kartasasmita Ginandjar ,*Pembangunan Rakyat Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pusataka Cidesindo, 1996.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia.
- Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13 No 3 tahun 2015
- M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994.
- Maria Rosa, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul*, Yogyakarta, MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016.
- Muhammad Thollah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta:Lantabora Pres,2005.
- Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (walimatul'urusy) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang*.Desember 2016
- Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan Direktor Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depertemen Dalam Negri 2007.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*: Dapertemen Pendidikan Nasional, 2007, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),*Ekonomi Islam*,,Jakarta :Rajawali Press,2009.

Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*,(Yogyakarta: UPP STIP YKPN,2012).

Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sub Direktorat Statistik,*Analisis dan pembangunan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistika, 2008

Umar Chapra,*Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Pers.

UU NO.3 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12

Yusuf al-Qadharawi,*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah,2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Devi Afriliyana
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 14 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Trimulyo RT 002/ RW 003, Kec. Juwana,
Kab Pati, Jawa Tengah.
No. Hp : 089654300419
E-mail :

Pendidikan Formal :

1. TK Pratiwi Trimulyo (2002-2003)
2. SD N O2 Trimulyo (2003-2009)
3. SMP N 02 Batangan (2009-2012)
4. MA Salafiyah Kajen (2012- 2015)
5. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Kapan BUMDES aktif di desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Berasal dari mana dana untuk BUMDES Wahyu Urip ?
3. Apa program dan kegiatan BUMDES Wahyu Urip ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota dalam menjalani kegiatan BUMDES ?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES ?

MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang BUMDES ?
2. Bagaimana partisipasi bapak/ibu dalam kegiatan BUMDES?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui semua program BUMDES?
4. Apa saja kegiatan yang ada di BUMDES membantu permasalahan masyarakat khususnya keuangan ?

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1. Apa saja program yang ada di BUMDES ?
2. Apa saja kendala dalam kegiatan BUMDES ?
3. Bagaimana pengurus mengatasi permasalahan dalam kegiatan BUMDES ?
4. Bagaimana pembuatan struktur pengurus BUMDES di desa Trimulyo?
5. Siapa saja anggota BUMDES di desa Trimulyo?
6. Apa saja asset BUMDES di desa Trimulyo ?
7. Bagaimana implikasi kegiatan BUMDES Terhadap perekonomian masyarakat desa Trimulyo?

Lampiran 2



Wawancara bersama Bu Ika (Sekretaris BUMDES)



Wawancara bersama Bapak Dalio (Kepala Desa Trimulyo)



Kantor BUMDES Wahyu Urip



Kegiatan penjualan Pupuk



Kegiatan Pengelolaan Pasar Desa



Kegiatan Simpan Pinjam